

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018



**NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Nagari Lunang Tiga khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Lunang Tiga Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Nagari terkemuka di Wilayah Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi di bagian Selatan Sumatera Barat

Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN, SH

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

I. PENDAHULUAN

 A. TUJUAN 1

 B. VISI MISI 1

 C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 2

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI.. 2

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 4

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI . 6

 A. PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018 6

 B. PERATURAN NAGARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018 6

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 7

VIII. PENUTUP

 A. KESIMPULAN 7

 B. SARAN 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018
 - Rincian Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2018
 - Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
 - Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
- 2. Keputusan BAMUS Laporan Akhir Tahun Anggaran 2018
- 3. Berita Acara Nota Kesepakatan BAMUS dan Pemerintah Nagari.
- 4. Rincian Realisasi Kegiatan Dana PAN
- 5. Rincian Realisasi Kegiatan Dana ADD
- 6. Rincian Realisasi Kegiatan Dana DDS
- 7. Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBH
- 8. Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBK
- 9. Rincian Realisasi Kegiatan Dana DLL
- 10. Laporan Semester II
- 11. Laporan Kekayaan Nagari
- 12. Laporan PMK 225
- 13. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember 2018.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

- 1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- 2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, factor - faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

- a. Aparatur Nagari Lunang Tiga dan Masyarakat sepakat bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Nagari Lunang Tiga di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu.
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Nagari Lunang Tiga adalah dari Tahun 2018 sampai dengan 2024.
- c. Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Nagari Lunang Tiga dengan BAMUS Nagari Lunang Tiga bahwa visi Nagari Lunang Tiga adalah:

“ TERBENTUKNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK
DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI
YANG ADIL, DAMAI, MAKMUR DAN SEJAHTERA”

2. MISI

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Melakukan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Nagari Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pemerintahan
		Meningkatnya kualitas dan kwantitas aparatur nagari
		Memberikan budaya sopan dan santun dalam

MISI	TUJUAN	SASARAN
	Meningkatkan pemahaman dalam ilmu penyelenggaraan pemerintahan.	pelayanan masyarakat.
		Pelatihan aparatur nagari
		Study koperatif guna mencari inspirasi kemajuan nagari.
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pemahaman Masyarakat Tentang Agama Dan Kehidupan Bermasyarakat Yang Lebih Baik.	Meningkatkan minat belajar dan mengajar kepada masyarakat umum.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya agama
Misi 3: Menyelenggarakan Sistim Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Bisa Dipertanggungjawabkan Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang – Undangan.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik tentang proses penyelenggaraan pemerintahan nagari	Meningkatnya minat masyarakat dalam membantu jalannya pemerintahan nagari melalui kegiatan musyawarah Dll.
	Meningkatkan kegiatan keagamaan dalam lingkungan masing – masing	Meningkatnya jamaah masjid dan mushalla.
Misi 4 : Meningkatkan Perekonimian Masyarakat Melalui Program Pelatihan, Penyuluhan Dan Permodalan.	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter	Meningkatnya tingkat pendidikan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Meningkatkan sistim pelatihan (kursus) tentang peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya lapangan pekerjaan
		Meningkatnya penghasilan masyarakat
	Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
Misi 5: Menciptakan Kesejahteraan	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing

MISI	TUJUAN	SASARAN
Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana Dan Prasarana.	ekonomi kerakyatan	
	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Pekebun
	Meningkatkan infrastruktur kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
		Meningkatnya ekonomi masyarakat
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
		Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 6: Mendorong Peningkatan Pendidikan Formal Dan Non Formal Guna Melahirkan Generasi Muda Yang Berguna Bagi Nusa, Bangsa Dan Agama.	Meningkatkan minat belajar anak usia produktif	Meningkatnya sarjana nagari
		Menurunnya angka kebutaan pendidikan masyarakat nagari
	Meningkatkan Pelaksanaan pendidikan agama	Meningkatnya anak usia belajar agama
		Meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan beragama
		Terpeliharanya adat basandi sarak sarak basandi kitabullah
	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap pendidikan	Berkurangnya resiko anak putus sekolah
		Meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Nagari kelembagaan Nagari serta Masyarakat Nagari Lunang Tiga pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian Nagari dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pesisir Selatan serta penjabaran Visi Misi Nagari .Dari hasil pengkajian Nagari tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Nagari Lunang Tiga adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana Nagari seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Nagari
- d. Kapasitas Kelembagaan Nagari Masih Rendah
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Nagari berbasis Teknologi
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Nagari
- g. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- h. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Siltap dan Tunjangan
2. Operasional Kantor Nagari
3. Tunjangan BAMUS
4. Operasional BAMUS
5. Pengadaan Peralatan Kantor
6. Operasional raskin
7. Operasional Pemungutan PBB-P2
8. Pemilihan Wali Nagari
9. Perencanaan Pembangunan Nagari
10. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
11. Pengadaan Kendaraan Dinas
12. Lanjutan Pembangunan Pagar dan Plafon Aula Kantor Nagari
13. Pemeliharaan Taman Dan Bangunan
14. Operasional Linmas Nagari

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat
2. Kegiatan oprasional perkantoran
3. Tunjangan BAMUS
4. Kegiatan Oprasional BAMUS
5. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
6. Perencanaan Pembangunan Nagari
7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Gedung Kantor
9. Operasional Raskin
10. Intensifikasi Pemungutan PBB

11. Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
12. Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
13. Operasional Linmas Nagari

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Posyandu Lengkap Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Pembangunan Lokal MDA
3. Pengerasan Jalan Usaha Tani Rey 11
4. Cor Jalan Tengah Ujung Lanjutan
5. Cor Jalan Makam
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan
9. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
10. Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
11. Pembangunan Sarana Air Bersih
12. Pembangunan Jembatan
13. Pembangunan Ekonomi Produktif
14. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak huni

Program Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan
4. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
5. Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
6. Pembangunan Sarana Air Bersih
7. Pembangunan Jembatan
8. Pembangunan Ekonomi Produktif
9. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak huni

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyrakatan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Pembinaan PKK Nagari
2. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari
3. Pembinaan Lembaga KAN
4. Pembinaan SATLINMAS Nagari
5. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
6. Pelaksanaan Hari - Hari Besar Kebangsaan

Program Kerja Pembinaan Kemasyrakatan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
3. Kegiatan Pembinaan LPMN

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

1. Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat

3. Pemberdayaan Kader Nagari
4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6. Pemberdayaan Pendidikan dan Kebudayaan
7. Pemberdayaan TP-PKK Nagari
8. pengelolaan informasi nagari
9. Pendataan dan penyusunan Profil Nagari
10. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
3. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT
4. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari
6. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
8. Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa
9. Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

A. PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018. sebagaimana telah dirubah keperaturan Nagari Lunang Tiga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018, dengan (*Rincian Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2018*)

Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Nagari	Rp.	1.220.594.100,00
2.	Belanja Nagari	Rp.	1.210.995.807,28
	a. Bidang penyelenggraan Pemerintah Nagari	Rp.	445.658.810,13
	b. Bidang Pembnagunan	Rp.	549.985.058,00
	c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.274.835,00
	d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.	203.077.104,15
	Surplus/Defisit	Rp.	9.598.292,72
3.	Pembiayaan Nagari		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.401.707,28
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00

B. PERATURAN NAGARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018, *dengan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018.*

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Lunang Tiga, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat 2. Kegiatan oprasional perkantoran 3. Tunjangan BAMUS 4. Kegiatan Oprasional BAMUS 5. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari 6. Perencanaan Pembangunan Nagari 7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pemeliharaan Gedung Kantor 9. Operasional Raskin 10. Intensifikasi Pemungutan PBB 11. Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari 12. Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari 13. Operasional Linmas Nagari	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Nagari 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan 4. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan 5. Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat 6. Pembangunan Sarana Air Bersih 7. Pembangunan Jembatan 8. Pembangunan Ekonomi Produktif 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak huni	Minimnya dana nagari guna mencukupi semua target pembangunan yang direncanakan oleh nagari.	Perlu adanya pendapatan dari sumber – sumber lain selain dana transfer.

3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 3. Kegiatan Pembinaan LPMN	1. Belum adanya sosialisasi mengenai adat istiadat 2. Dana pembinaan lembaga kurang memadai	Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman terkait dengan tugas lembaga.
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 3. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT 4. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 5. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari 6. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 8. Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa 9. Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga	1. Perlu adanya pembinaan organisasi kepemudaan. 2. Perlu adanya profil nagari yang valid. 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Perlu adanya dana lebih guna peningkatan kelembagaan pemuda. 2. Perlu adanya pendataan dari pintu ke pintu 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal - hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari Lunang Tiga
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Lunang Tiga tahun anggaran 2018 berdasarkan APB Nagari
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Lunang Tiga.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Akhir Tahun Anggaran 2018. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Nagari Lunang Tiga.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, maka kami dari pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Nagari, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Lunang Tiga, 15 Maret 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN, SH